



Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

Arfin Sudirman¹, Yusa Djuyandi^{2*}, Fajri Syahal Guna Pratama¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Jawa Barat-Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Jawa Barat-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Sep 05, 2022

Diterima: Jan 24, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Australia; Indonesia;
Industri Pertahanan;
Lombok Treaty;

Koresponden:

Yusa Djuyandi

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Email:

yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Sitasi Cantuman:

Sudirman, A., Djuyandi, Y.,
Pratama, F. S. G. (2023).
Memahami Dinamika
Kerjasama Industri Pertahanan
dalam Kerangka Indonesia
Australia Defence Security
Dialogue. *Journal of Political
Issues*. 4(2); 120-136.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This article aims to explore and understand the dynamics of relations between actors involved in Indonesian defense industry cooperation in efforts to improve defense in the land dimension. By using the Military Industrial Complex (MIC) theory and qualitative methods, this article finds that the relations and involvement of both state actors (public sector) and non-state actors (private sector) in fulfilling the needs of land-based defense in Indonesia cannot be avoided even though the true defense industry is public goods. In addition, by exploring the role of each stakeholder and the synergy between the actors, in this case the three actors are legislators, governance agencies, private companies and also added end-users in the context of the Military Industrial Complex (MIC), this article understands that the defense industry is a complex industry because it involves complicated bureaucratic channels but at the same time, the state is required to catch up with the defense equipment technology of countries in the region in order to create a significant deterrent force.

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia upaya meningkatkan pertahanan di matra darat. Dengan menggunakan teori *Military Industrial Complex* (MIC) dan metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa relasi dan keterlibatan baik aktor negara (*public sectors*) maupun non-negara (*private sectors*) dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan sejatinya merupakan *public goods*. Selain itu, dengan mengeksplorasi peran masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut legislator, *governance agency*, *private company* dan juga ditambah *end-user* dalam konteks *Military Industrial Complex* (MIC) artikel ini memahami bahwa industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Tentang:

Arfin Sudirman, menyelesaikan studi S3 (Doktoral) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Yusa Djuyandi, menyelesaikan studi S3 (Doktoral) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Fajri Syahal Guna Pratama, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

PENDAHULUAN

Hubungan Australia - Indonesia mengacu pada hubungan luar negeri antara Australia dan salah satu dari sedikit negara tetangganya, Indonesia. Yang dimulai sejak 1640 dengan kontak antara Penduduk Asli Australia dan para teripang Makassar dari Sulawesi barat daya dan diresmikan dengan pengakuan penuh Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949. Kedua negara adalah anggota G20, Forum Regional ASEAN, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Selandia Baru-ASEAN. Indonesia menerima \$ 541,6 juta dalam bantuan pembangunan Australia pada 2012-2013 (Thompson, 2006).

Australia telah melakukan dialog dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Sejak 1975, Australia telah mengadakan 25 pertemuan dengan Amerika Serikat, dan setahun sekali sejak 1975. Selama periode 6 tahun, Australia dan Inggris mengadakan tiga pertemuan, dan pada tahun 2007 hingga 2010, Jepang mengadakan pertemuan setiap 18 bulan. Dialog pertemuan pada bidang pertahanan dan keamanan semula bernama Indonesia-Australia Informal Meeting, akan tetapi ketika diadakannya pertemuan kedua yang dihelat di Yogyakarta, kedua perwakilan setuju menamakan pertemuan informal Indonesia-Australia tersebut sebagai Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (*Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework for Security Cooperation*, 2006).

Sejak 2004, forum tersebut diselenggarakan secara bergantian antara kedua belah negara yakni Indonesia dan Australia pada setiap tahunnya. Awalnya, tujuan dibentuknya Kerjasama formal Australia-Indonesia Ministerial Dialogue yakni demi peningkatan pola hubungan kedua negara sebagai mitra strategis terkhusus di Kawasan Asia-Pasifik. Pada 13 November 2006 Indonesia dan Australia menandatangani Framework Agreement on Security Cooperation di Pulau Lombok, Indonesia. Perjanjian kerangka kerjasama keamanan tersebut dilatarbelakangi oleh keperluan Indonesia memasukkan jaminan pengakuan Australia atas kedaulatan Republik Indonesia ke dalam suatu kerangka perjanjian (Augusta, 2014).

Demikian juga terhadap pernyataan tidak mendukung gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Indonesia dan Rencana Aksi bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam IADSD terdapat beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam poin kerjasama keamanan maritim, yaitu Join SAR Operation Badan SAR Nasional dan Australian Maritime Safety Authority, latihan bersama patroli laut TNI angkatan laut Indonesia dan Royal Australian Navy. Sejumlah insiden dan ketegangan di masa lalu sempat mewarnai dinamika hubungan pertahanan Indonesia-Australia.

Berdasarkan kekuatan pokok minimum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Minimum Essential Forces merupakan proses memodernisasi alutsista Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. *Based defense* dalam perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan sebagaimana diimplementasikan dalam program MEF. *Capability-based defense* merupakan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan identifikasi ancaman berbasis kemampuan anggaran. Berikut ini adalah data pencapaian aspek fisik alutsista tahun 2010-2024:

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL			
			JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JML	%(8/15)		
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI			s.d. MEF-III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	TNIAD			64,89%				74,62%								49,33%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564				783.462	82,85%
	b. Meriam / Roket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354				2.162	63,41%
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	359	2.000	53,50%			3.738				4.858	41,17%
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224				1.224	9,89%
2	TNIAL			55,55%				68,72%								45,47%
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			182				262	61,45%
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8				12	33,33%
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100				160	53,13%
	d. Ranpur Maritim	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978				1.481	33,96%
3	TNIAU			43,97%				44,40%								32,64%
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344				469	56,93%
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32				32	62,50%
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72				96	0,00%
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64				216	11,11%
	Prosentase			41,92%				54,80%								62,58%

Sumber : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Fitri & Sanur, 2019)

Gambar 1 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Data di atas menunjukkan pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF dari renstra I hingga renstra II untuk kekuatan tiga matra pertahanan, yang juga menunjukkan kondisi kekuatan alutsista Indonesia. Data di tabel di atas menunjukkan bahwa pemenuhan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian MEF (Fitri & Sanur, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berakhirnya juga beberapa perang besar di dunia mengakibatkan beberapa negara kurang mengembangkan bidang pertahanannya pasca perang terjadi dan lebih berfokus kepada hal-hal *low-politics* dibandingkan *high-politics*, karena alangkah lebih baiknya kemampuan pertahanan suatu negara merupakan suatu simbol kekuatan, kedaulatan dan juga sebagai penggerak dalam dunia diplomasi tentunya (Milia et al., 2018). Hal tersebut juga menyiratkan pentingnya pertahanan sebagai unsur pokok upaya sebuah negara dalam mempertahankan eksistensinya. Dewasa ini, pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung didalam makna pertahanan itu sendiri. Adapun pertahanan sebuah negara dikatakan kuat, kedaulatan serta kekayaan nasional di darat, laut, maupun udara, tidak akan mudah diganggu-gugat oleh negara lain mana pun.

Kelembagaan pertahanan industri disebut sebagai pertahanan pemerintah, pengguna dan industri yang terintegrasi dalam konektivitas dan tanggung jawab. Pemerintah memberikan mandat kepada KKIP sebagai koordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan industri pertahanan (Anwar, 2018). Permasalahan muncul ketika kebijakan industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Selain itu, tingginya ketergantungan industri pertahanan Indonesia dengan teknologi militer yang dimiliki oleh aktor negara lain merupakan salah satu agenda utama dalam pembinaan pertahanan Indonesia dan

Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Fajri Syahal Guna Pratama:

Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

juga Australia melalui agenda pertemuan Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IADSD). Dalam upaya untuk mengembalikan kemampuan Industri Pertahanan Nasional dan mengurangi kebergantungan Indonesia akan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) buatan luar negeri, Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan.

Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan Industri Pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II yang menghasilkan Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Industri pertahanan yang akan periset urai dan akan digunakan sebagai konsep dasar, guna relevansi dan korelasi dari substansi yang akan dibahas lebih detail dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu penulis menggunakan konsep "military industrial complex". Dengan menggunakan konsep tersebut yang secara singkat merupakan salah satu konsep dalam defence studies yang membahas tentang aliansi informal antara militer suatu negara dan industri pertahanan yang memasoknya, dipandang bersama sebagai kepentingan pribadi yang mempengaruhi kebijakan publik.

Sesuai dengan substansi utama yang dibawakan mengenai industri pertahanan maka konsep ini sangat penting dan tak bisa dipisahkan dalam proses pengkajian. Untuk mendukung konsep tersebut juga disertai dengan satu teori yang merupakan sub-pembahasan tambahan guna mendukung keabsahan konsep yakni Iron Triangle dan juga nantinya akan mendalami mengenai aktor utama yang berperan dalam pengelolaan industri pertahanan yang akan menjadi fokus utama penulis kali ini yakni *Congress, Governance Agency, Private sector* dan juga dibantu aktor pendukung lainnya, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Penelitian ini didasari juga didukung oleh beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar serta referensi guna pemahaman terhadap fenomena penelitian yang lebih dalam. Beberapa penelitian tersebut fokus membahas strategi optimalisasi industri pertahanan, tantangan dan peluang, beserta perjanjian yang disahkan yang mengacu kepada Lombok Treaty, IADSD dalam melihat kapabilitas dan kemandirian industri pertahanan Indonesia dimana peneliti mengacu pada tiga studi terdahulu, yakni (Breitenbauch & Jakobsson, 2018; Koseoglu, 2012; Monratama, 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar dan referensi dari penelitian ini. Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak fokus membahas strategi peningkatan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia melalui kerja sama dengan Australia melalui bentuk regulasi dan perjanjian kedua negara, yakni Lombok Treaty. Selain itu, bahasan mengenai Implementasi dan perkembangan dari adanya dialog kerja sama IADSD dengan melihat perspektif National Interest Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang strategi optimalisasi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan melalui agenda IADSD. Dengan lebih menekankan pada relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia sebagai fokus pembahasan, artikel bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika yang terjadi dalam upaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia.

Maka secara keseluruhan penelitian ini melihat kepada strategi optimalisasi kerja sama pertahanan Indonesia - Australia melalui agenda Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IADSD) dalam peningkatan kapabilitas Industri Pertahanan Indonesia terkhusus pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia setelah diadakannya kerja sama dengan Australia sebagai peningkatan kemandirian Industri pertahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan kajian literatur serta dokumen, termasuk juga berbagai macam rekaman gambar maupun

suara yang relevan dengan strategi optimalisasi peningkatan industri pertahanan Indonesia. Penelitian kualitatif ini digunakan agar sesuai dengan rumusan dan tujuan artikel ini yaitu eksplorasi isu kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk memahami adanya dinamika dalam sumber-sumber yang didapat maupun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan analisa data muncul dalam bentuk pernyataan maupun tertulis (Lamont, 2015). Wawancara dilakukan di sejumlah tempat di Jawa Barat dan juga Jakarta terhadap beberapa informan sebagai berikut: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dirjen Strategi Pertahanan, Ditjen Kerja sama Internasional, Kasi Kawasan Asia – Pasifik; Lembaga Think Tank, Centre for Strategic and International Studies, Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit; PT. Pindad, Senior Officer aliansi bisnis produk Hankam.

Adapun model analisis yang digunakan adalah *Document based research*, *Interview* dan *Internet based research* dengan mentriagulasikan ketiga analisis tersebut, lalu diinterpretasikan dalam bentuk pemahaman gabungan dari sumber yang didapat penulis Tahapan analisis menggunakan konsep Military Industrial Complex dengan tambahan teori *Iron Triangle* yang berfokus kepada, Strategi Optimalisasi, Kesepakatan kerja sama, dan juga Lobi-lobi yang dilakukan beberapa aktor yang terlibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia Pada Bidang Pertahanan Dalam Agenda IADSD

Pada tanggal 13 November 2006, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kerangka kerja sama keamanan di Mataram, Lombok, yang disetujui oleh Parlemen Indonesia pada tahun 2007. Dengan dibentuknya traktat Lombok yang mana sebagai pencegahan perselisihan antara Australia dan juga Indonesia, Di sisi lain kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara dengan resmi telah melakukan penandatanganan perjanjian keamanan pada 13 November tahun 2006 di Mataram, Lombok. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan terkait persengkataan keamanan dalam cakupannya antara Australia dan juga Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini lingkup kasus yang terjadi antara kedua negara merupakan pemakaian dengan informasi dari Badan Intelijen Australia kepada Presiden Republik Indonesia kala itu, dimulai sejak 2009 dan baru adanya tindak lanjut pada 2013.¹

Pada 15 Januari 2014, para imigran gelap berimigrasi ke Australia dan merampas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, persoalan efektivitas Lombok Treaty dalam mencegah sengketa keamanan antara Indonesia dan Australia. Kurang lebih terdapat tiga variabel yang mengakibatkan pembatalan pada Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. Pertama, seperti ada perbedaan suku bunga antara Indonesia dan Australia (Toohey, 2014).

Sedangkan pada variable akhir yakni terdapatnya ketidakselarasan rencana strategis Pemerintah Indonesia dengan Australia. Singkatnya dalam hal ini bisa dilihat bahwa dengan dijalinnya kerjasama keamanan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam bentuk Traktat Lombok dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan persengkataan keamanan kedua negara. Sebelum Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan pada tahun 2006, kebutuhan kerjasama keamanan antara kedua negara telah dibahas sejak tahun 2003. «Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Australia» diusulkan selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (Sakti, 2016).

Selanjutnya, pertemuan para menteri luar negeri diadakan di New York pada Sidang Umum PBB untuk membahas dan menyepakati teks akhir kesepakatan struktural antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia kemudian melakukan kerja sama.

¹ Indonesia - Australia upaya indonesia untuk mencegah gerakan separatisme di indonesia timur.

Dalam hal ini pula menjalin Kerjasama demi meningkatkan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia . Yang mana menunjukkan bahwa Australia membantu memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satu kekuatan Australia adalah keamanan internal Indonesia juga mempengaruhi keamanan internal Indonesia (Anwar, 2018).

Beberapa kejadian menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari dukungan Australia. Tsunami Aceh merupakan bukti nyata bahwa militer Australia memiliki dampak berupa kontribusi yang terlihat nyata bagi Indonesia. Perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia dalam Lombok Treaty memuat beberapa prinsip. Berdasarkan prinsip di atas, Indonesia berkepentingan dengan Australia, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dengan berbagi informasi dan intelijen, Australia dapat dengan mudah mengukur pertahanan Indonesia dan mengambil tindakan yang tepat untuk melawan Indonesia, yang dianggap sebagai kunci keamanan kawasan. Ketiga, Pasal 3.18 menyatakan bahwa Indonesia memperoleh layanan dan bantuan dalam situasi darurat adalah menguntungkan. Namun ayat ini juga dapat dijadikan sebagai peluang bagi Australia untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia, apalagi Indonesia merupakan daerah yang rawan konflik dan bencana alam sehingga memudahkan Australia untuk masuk ke Indonesia (Saroinsong, 2008).

Industri pertahanan, juga dikenal sebagai industri militer, terdiri dari perusahaan pemerintah dan komersial yang meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memelihara peralatan dan layanan. Instalasi militer menjadi sangat Sangat penting untuk menjaga suasana nasional yang aman dan kondusif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi (Milia et al., 2018). Negara yang menentang kelompok kepentingan terdidik dibarengi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara maksimal serta kemampuan sumber daya manusia yang andal untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan industri pertahanan Indonesia pada tahun 2025.

Dalam kaitan ini, industri pertahanan Indonesia perlu merevitalisasi dan mengembangkan usahanya, dan perusahaan harus berkonsentrasi mengembangkan produk yang sebanding dengan produk komersial (Dunlap, 2011). Sejak 2018, anggaran pertahanan berada pada tren yang meningkat, dari 106,8 triliun rupiah menjadi 127,35 triliun rupiah pada tahun 2020. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi industri pertahanan yang memanfaatkan sepenuhnya energi dan sumber daya lokal tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing internasional negara tersebut. Studi pertahanan nasional, sejarah dan empiris Indonesia yang ekstensif telah menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan industri pertahanan, dan pengalaman Indonesia tentunya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan model pengembangan industri pertahanannya sendiri. Karena alasan politik dan strategis, hampir semua negara berkembang memilih untuk mendirikan industri pertahanannya sendiri.

Berdasarkan pengalaman, banyak negara menguji dan mengkonsolidasikan industri pertahanan untuk memastikan kinerja yang efisien dan efektif. Basis industri juga mengharuskan Indonesia untuk memilih dari tiga kemungkinan model seleksi yang biasa terlihat dalam pengembangan industri pertahanan. Perkembangan dan revitalisasi industri pertahanan Indonesia diawali dengan pengembangan peralatan industri militer milik negara yang kini bernama PT Pindad. Tahapan berikutnya yakni pembuatan 4 industri pertahanan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Bidang bahan peledak Dahana menjadi 10 industri strategis yang dinaungi Industri Strategis Milik Negara. Industri pertahanan saat ini dan masa depan yang dibutuhkan Indonesia yang kuat dan mandiri. Banyak partai politik tidak mendukung anggaran pertahanan yang besar. Terkait manfaat langsung anggaran pertahanan, diperlukan kebijakan yang lebih kompleks.

Sebab, manfaat langsung dari lingkungan yang damai tidak selalu berkaitan langsung dengan besarnya anggaran pertahanan. Terciptanya perdamaian dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti dukungan kekuatan asing, hubungan persahabatan dengan negara tetangga,

saling ketergantungan antar negara di kawasan, dan koeksistensi yang harmonis dari kepentingan antar subyek yang berinteraksi dengan mereka.

Australia Defense Security Dialogue

Setelah operasi Trikora dan Dwikora dimulai, hanya pihak yang mengkhawatirkan keberadaan negara Indonesia, dan ada kecenderungan untuk berkembang. Selain itu, kontroversi juga berkisar pada isu-isu yang berkaitan dengan Timor Timur, pengungsi, pers, dan hak asasi manusia. Masyarakat Australia mempercayai bahwa pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan melaporkan kepada pers Australia di tingkat manapun di Indonesia. Langkah ini membuat marah rakyat Indonesia karena sebagian besar pengungsi Indonesia bagian dari gerakan separatis yang mencoba melarikan diri dari Indonesia.

Pemerintah Australia mendukung gerakan separatis di Indonesia yang akan memecah belah Indonesia. Penguatan hubungan yang rapuh ini membutuhkan kompromi berupa kesepakatan yang menghargai keberadaan dua negara, salah satunya adalah *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006*, yang ditandatangani di Lombok, pada November 2006. Indonesia dan Australia sedang membentuk mekanisme advisory yang bertujuan untuk memperkuat, melaksanakan dan melaksanakan kegiatan kerjasama antara kedua negara, termasuk memperkuat kerjasama antara kedua negara dan lembaga dari kedua negara.

Menurut data SIPRI, anggaran pertahanan Indonesia sebagai persentase dari PDB selama periode 2009-2018 masih di bawah 1% dari PDB atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Perjanjian keamanan ini berisi dua mekanisme khusus. Intinya, jika muncul masalah kekayaan intelektual, seperti legalitas alih pengetahuan dalam hal alih teknologi, kedua negara sepakat untuk tidak mempertimbangkan perjanjian dan menandatangani perjanjian baru alih-alih penerapan perjanjian. Perjanjian perjanjian pembiayaan adalah perjanjian keuangan antara kedua negara, dan perjanjian yang terkait dengan perjanjian adalah perjanjian antara kedua negara.

Optimalisasi Indonesia dalam peningkatan kapabilitas industri pertahanan dengan *Military Industrial Complex*

Kompleks militer industri merupakan salah satu konsep dalam industri pertahanan yang pada mulanya dikemukakan oleh Dwight D. Eisenhower Presiden Amerika Serikat ke-34. Kompleks militer industri atau *Military Industrial Complex* merujuk pada hubungan ekonomi yang menjadi sebuah regulasi yang berstruktur untuk penganggaran input dan untuk perencanaan program atau keluaran, masalahnya dilihat sebagai menemukan cara yang paling efisien untuk menghasilkan aspek-aspek keamanan nasional secara efisien dalam mendukung produksi tingkat keamanan optimal. Industri pertahanan adalah bagian dari kompleks industri militer, sebagai suatu sistem, sistem merupakan lingkaran elaborasi dari institusi militer, industri militer dan pemerintah yang diharapkan bertujuan untuk mendapatkan cara paling efektif untuk menyediakan tingkat keamanan untuk mendukung tingkat keamanan untuk proses dan program untuk pendapatan (Dubbury, 1971).

Terdapat keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara yang merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Yakni tiga hal penting tersebut harus ditingkatkan demi berhasilnya Kerjasama pertahanan yang dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :

1. *Confidence Building Measures* berdasarkan *Lombok Treaty* bahwa pada artikel 1 (1) secara luas didefinisikan sebagai langkah-langkah yang menangani, mencegah, atau menyelesaikan ketidakpastian di antara negara bagian. Dirancang untuk mencegah eskalasi permusuhan yang diinginkan dan terutama yang tidak diinginkan dan

Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Fajri Syahal Guna Pratama:

Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

membangun rasa saling percaya yang sangat relevan dalam menangani dan bekerja menuju penyelesaian kebuntuan politik jangka panjang. Yang pada hal ini Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dalam agenda IADSD

2. *Defense Capabilities* salah satu masalah utama yang menjadi dasar kemampuan untuk mencapai efek yang diinginkan dalam lingkungan operasi tertentu. " Itu ditentukan oleh tiga faktor yang saling bergantung: kesiapan, keberlanjutan, dan struktur angkatan bersenjata.. Dengan melihat sejauh mana *Minimum essential force* Indonesia setelah menjalin *strategic partnership* dengan Australia, fase Indonesia sudah memasuki fase ketiga yang dicanangkan tahun 2024 ditargetkan terjadi peningkatan sejumlah 100 %
3. *Defense Industry* sebagai bisnis global yang memproduksi senjata dan teknologi dan peralatan militer. Secara konsisten terdiri dari perusahaan perdagangan yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemeliharaan bahan, peralatan, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas militer . Perusahaan pembuat senjata, disebut juga sebagai kontraktor pertahanan atau industri militer. Pada hal ini aktor kunci utama sebagai penyedia atau *provider* adalah PT. Pindad yang menerima *by order* dari Kemhan yang nantinya akan digunakan oleh *user* yakni TNI AD sebagai matra darat.

Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu Kerjasama pertahanan dapat terjadi *mutual partnertship* dan menjadi acuan pula pada saat penyusunan, pembuatan regulasi dan juga implementasi terkait industry pertahanan di Indonesia. Yang mana dalam hal ini *MIC* di Indonesia terbentuk karena adanya upaya lobi dan pola hubungan aktor non negara yang didasari oleh perjanjian *Lombok Treaty* sebagai kerangka rencana aksi *Starategic Partnership* dengan Australia. Yang nantinya terdapat aktor non-negara yang berperan dalam hal ini.

Berdasarkan analisis penulis, penggunaan konsep *MIC* dalam melihat kapabilitas industry pertahanan Indonesia dapat ditinjau pada *Lombok Treaty* yang tertera pada dokumen *Agreement Between Australia And The Republic Of Indonesia On The Framework For Security Cooperation*. Yang utamanya dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni pada prinsip *Comprehensive Partnership* untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut berdasarkan penghormatan terhadap integritas dan kesatuan wilayah satu sama lain dan mengkonsolidasikan dan memajukan kerja sama di bidang-bidang utama, termasuk keamanan antara Indonesia dan juga Australia.

Military Industrial Complex Sebagai konsep kunci memahami industri pertahanan untuk menunjang kebutuhan pertahanan, dibutuhkan proses yang panjang dan harus dilanjutkan. Selama ini proses tersebut masih terkendala oleh berbagai kendala, seperti: Belum mencukupinya dana untuk penelitian dan pengembangan alutsista, permasalahan kerjasama pertahanan negara, dan buramnya pengadaan alutsista. Pengembangan kemandirian industri pertahanan membutuhkan kemauan politik pemerintah yang diikuti dengan peningkatan tingkat profesional industri pertahanan. Oleh karena itu, DPR RI telah memainkan peran kunci melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, terutama dalam menyelaraskan peningkatan kapasitas industri pertahanan dengan kebutuhan proteksi beras. Karena fungsi pengawasan Komite Pertama FREP-RI, maka perlu terus didorong pemerintah untuk secara efektif memenuhi persyaratan MEF. Khususnya dalam hal ini mendorong penggunaan produk produksi dalam negeri, meningkatkan alutsista nasional melalui rencana penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab pembelian alutsista nasional.²

Pengadaan alutsista dari Australia yang telah ada dari SIPRI arms transfer database. Biasanya melibatkan hibah barang bekas (terutama transport aircraft) yang bukan diproduksi Australia tapi Amerika. Memang ada rencana pembelian Bushmaster yang diproduksi Thales

² Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

Australia, yang nantinya dikerjasamakan dengan Pindad., karena kerjasamanya bersifat business to business bukan G-to-G.³

Konsolidasi kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia pada forum dialog sangat terjalin dengan baik selain itu pelatihan dan pendidikan, kunjungan kedua negara, dan latihan Bersama sering menjadi agenda rutin ketika dihelat dialog tersebut. Pertemuan Kelompok Kerja Dialog Pertahanan Strategis Indonesia-Australia-Australia (IADSD) Kementerian Pertahanan dan Komite Tingkat Tinggi Australia-Indonesia tingkat TNI meningkatkan pembangunan kapasitas dan menjalin hubungan dekat antara militer masing-masing negara⁴

Forum Dialog telah menjadi sarana untuk bertukar pendapat dan informasi mengenai isu-isu strategis keamanan kedua negara saat ini. Dengan bantuan informasi dan pandangan terbaru tentang permasalahan terkait hal-hal strategis kedua negara telah mampu teratasi dan mencegah ancaman yang menjadi tantangan keamanan bersama.

Berdasarkan dari perintah Menhan Prabowo. Proyek kerjasama yang bermanfaat lainnya seperti kerjasama pendidikan, kunjungan dan pertukaran, patroli terkoordinasi, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata juga telah mencapai hasil yang luar biasa dan telah memberikan kontribusi penting untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Australia.⁵

Dengan adanya wadah dialog pertemuan tentu menjadi salah satu maintenance relations yang baik guna menjaga persahabatan dua negara yang saling bertetangga, yang bisa menjadi rencana besar untuk kedepannya dengan terjalinnya hubungan diplomatic dengan Australia,

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dapat mengambil langkah-langkah terukur untuk melaksanakan segala kebijakan pemerintah dari berbagai jalur, termasuk kerja sama bilateral seperti IADSD.

Menteri Pertahanan Indonesia menyambut baik komitmen Australia untuk memperkuat kerja sama di industri pertahanan. Oleh karena itu, perusahaan pertahanan kedua negara harus saling belajar untuk mencari cara kerja sama yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Indonesia dan Australia berharap untuk lebih memperkuat dan memperkuat hubungan kerja sama yang baik sebelumnya di bidang pertahanan. Upaya kedua negara akan dibahas dalam agenda tahunan ke-14 Indonesia-Australia Strategic Defense Dialogue yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 21-22 September 2016. Thales dan pengangkut personel lapis baja Indonesia PT Pindad akan berkolaborasi dalam sebuah proyek yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan surat keputusan SKEP/37/P/BD/I/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan yang berisi mengenai seperti apa kesepakatan yang dilaksanakan antar *private company*.

Pindad dengan Thales Group Australia yang berhasil melakukan Transfer of Technology alphanhakhm kendaraan tempur anti ranjau Sanca dengan Bushmaster sebagai salah satu produk hasil dari kerja sama antara stek holder yang terlibat yang salah satunya dalam konsep MIC Iron Triangle Private Company menjadi salah satu aktor provider yang membantu User dalam hal ini TNI AD karena berfokus pada matra darat dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan yang dimiliki Indonesia. Pindad tentu saja memiliki pedoman berdasarkan sifatnya yakni perusahaan sebagai pihak yang mencari mitra perusahaan sebagai rekan kerja

³ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani fakhr, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

sama dalam hal ini PT. Lalu kemudian diadakanlah kerja sama dan diskusi koordinasi antar berbagai aktor yang terlibat yakni Kemhan, PT. Untuk membahas hal-hal yang mendalam dan lebih rahasia, kedua belah pihak membuat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement.

Kolaborasi ini bertujuan untuk sangat memperkuat kemampuan operasional kendaraan lapis baja yang diusulkan oleh PT Pindad kepada TNI. Pindad mengadakan kerja sama yang didalamnya terdapat klausul pemasaran dan penjualan maka mitra harus memberikan dokumen LOA surat penunjukan dan POA surat kuasa. Salah satu buah hasil lainnya dari kerja sama tersebut yakni meningkatkannya produksi Senapan SS1 dan SS2 dalam jumlah ratusan juga produksi Pindad merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI. Tak hanya senjata dan munisi, Pindad juga telah mendukung TNI dengan berbagai jenis kendaraan khusus, seperti Anoa 6x6 yang telah digunakan TNI dalam jumlah ratusan unit menjadikan sebagai salah satu kemajuan mandiri dalam produksi alpanhakhm dan alutsista dengan Transfer of Knowledge yang telah dijalain dengan Australia melalui B2B.

Pindad berperan sebagai pelaku industri pertahanan yang tugasnya adalah untuk menyediakan produk-produk alpanhakhm untuk digunakan oleh TNI sebagai end-user. Pindad dengan Thales Group Australia, dan menjadi sebuah kata kunci utama dalam analisis penelitian ini yang mana output atau tujuan utamanya sebagai upaya pengoptimalisasian kapabilitas industri pertahanan bagi Indonesia. Sanca adalah kendaraan berpelindung 11 ton 4x4 dengan muatan 4 ton, yang dirancang untuk melakukan beragam profil misi. Sanca dirancang dan dibangun untuk 10 hingga 12 penumpang, menggabungkan perlindungan tingkat tinggi dari ledakan dan balistik dengan mobilitas off-road yang sangat baik.

Sanca didasarkan pada desain Thales Bushmaster, kendaraan yang terbukti di medan perang dalam pelayanan dengan enam negara di empat benua yang telah membuktikan kinerja dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa selama operasi. MoU tersebut juga memperluas kerja sama yang mencakup transfer teknologi dan pelatihan untuk manajemen dan pemeliharaan radar, suatu bidang yang dimasukkan Kementerian Pertahanan Indonesia di antara tujuh proyek strategis.

Optimalisasi Kerja sama PT. Pindad dengan Thales Group Australia dan outputnya pada industri pertahanan dalam *Iron Triangle*

Optimalisasi suatu strategi Tentunya sangat sulit untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan arus relasi antar pelaku industri pertahanan Indonesia. Namun dalam hal ini, hubungan politik dan ekonomi antara pembuat undang-undang, TNI, dan TNI juga memiliki partisipan yang penting. kekuasaan. Industri militer melibatkan masukan politik, persetujuan politik atas pengeluaran militer, dan lobi birokrasi dan industri. Ketiga lembaga ini sekarang disebut Kongres / Parlemen, Kementerian Pertahanan, dan Industri Pertahanan, dan kemudian dikenal sebagai Organisasi Segitiga Pertahanan.⁶

Dasar hukum yang berkenaan dengan industri strategis terutama didasarkan pada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UU Perindustrian menjelaskan bahwa industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan penguasaan kehidupan masyarakat. Banyak orang menambah atau menghasilkan nilai strategis sumber daya alam, atau perlindungan dan keamanan negara terkait dengan penyelenggaraan misi negara. Terlihat dari artikel ini industri strategis dapat dikatakan berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Di bidang peningkatan kapasitas pertahanan negara, industri strategis menjamin ketersediaan alutsista yang berkelanjutan. Pasokan alutsista yang stabil merupakan prasyarat kemampuan dan kepercayaan diri dalam merumuskan rencana

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

jangka panjang untuk membangun kapabilitas pertahanan tanpa mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi seperti blokade atau pembatasan.⁷

Untuk memenuhi kebutuhan alutsista, pemerintah Indonesia harus bekerja keras meningkatkan kemampuan industri strategisnya untuk menopang angkatan bersenjata sehingga industri strategis harus terus berkembang untuk mencapai kemandirian. Pada saat yang sama, para pimpinan negara dan TNI dapat membuat komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tim pertahanan TNI melalui sinergi dan penyederhanaan industri strategis yang ada. Ketergantungan jangka panjang pada kebutuhan tim pertahanan TNI asing dapat menciptakan celah, terutama pada keinginan TNI untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan rencana pembangunan strategis nasional yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi perekonomian negara.

Demi tercapainya hal-hal yang telah direncanakan tersebut, agar bisa terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, semua pihak atau departemen terkait lainnya perlu menyatukan tekad dan arahnya, bekerja sama, serta mengoptimalkan sektor-sektor strategis dan partisipasi teknologi. teknologi nasional. Lembaga penelitian ilmiah telah memperluas fungsi alutsista TNI, termasuk alutsista yang dibutuhkan TNI AD. Mengenai industri strategis yang salah satunya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan TNI, PT Pindad (Persero), sebuah badan usaha milik negara yang bertujuan untuk secara mandiri mensuplai perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk sistem persenjataan dan membantu pengamanan. Dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Segitiga besi merupakan bentuk hubungan strategis yang dibentuk oleh kompleks industri militer. Disebut kompleks karena berkaitan dengan kompleksitas hubungan. Kompleksitas yang dipertimbangkan terkait dengan sejauh mana ketiga pihak tersebut berbagi peran. Ketika negara (parlemen dan Kementerian Pertahanan) memiliki pengaruh yang lebih besar, maka akan lebih memperhatikan kedaulatan dan kemerdekaan. Jika industri pertahanan menyumbang sebagian besar, maka aliansi, kolaborasi, dan privatisasi (komersialisasi) akan memainkan peran penting. Sebagai pertahanan segitiga jahat (karena perang antar negara dipengaruhi oleh hubungan tripartit), pertahanan segitiga besi penting untuk perlindungan, terutama ketika negara lain terlibat.⁹

Adapun pada aktor di Indonesia yang memegang regulasi kebijakan, perumusan undang-undang, dan juga sebagai penyedia atau *provider* yang mana dalam hal ini Kementerian Pertahanan sebagai *Governance Agency* memiliki peranan penting pembuatan regulasi pendanaan dan juga kebijakan terkait industri pertahanan di Indonesia, Adapun DPR RI sebagai *Beuracracy* memiliki peranan sebagai perumus undang-undang sebagai dasar Kemhan membuat suatu regulasi. Dan aktor selanjutnya yakni PT. Pindad sebagai penyedia Alpanhakham dan Alutsista yang nantinya akan langsung digunakan oleh *User* yakni TNI AD sebagai pengguna Alpanhakham tersebut.

Salah satu standar kebijakan terkait pemenuhan aspek alutsista adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional yang dirumuskan sesuai dengan UU Industri Pertahanan 16/2012. Undang-undang tersebut mewajibkan industri pertahanan nasional menjadi integrator terdepan pengembangan teknologi pertahanan. Hingga 2019, Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengidentifikasi 110 perusahaan pertahanan di BUMN dan BUMS.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

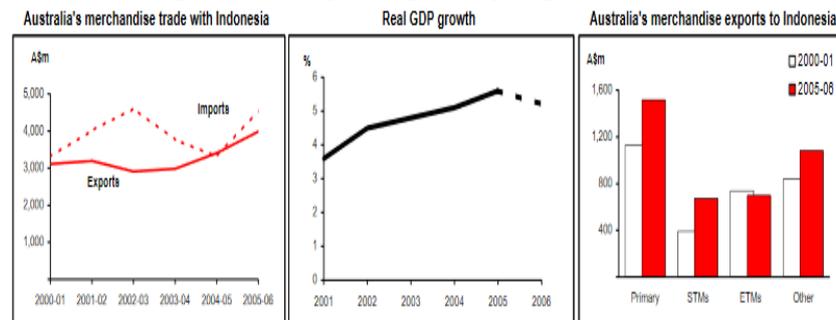
⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

Saat ini industri pertahanan Indonesia dapat memproduksi berbagai alutsista pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) diantaranya Anoa, CN-235 dan NC212 milik PT Pindad.¹⁰

Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, Kemhan telah merumuskan pedoman dan arah kebijakan pengembangan kolaboratif industri pertahanan melalui berbagai arah, khususnya pengembangan penelitian dan teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri. Agen departemen mengumumkan. Menhan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi terkini. Langkah strategis ini bertujuan untuk lebih mendukung berkembangnya industri nasional pada tahap pengembangan produk pertahanan dan membentuk ekosistem industri pertahanan. (Budiman, 2021)

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Industri Strategis dan Pengurus serta Manajemen Industri Pertahanan dan Keamanan menjadi tonggak penting dalam pembentukan industri pertahanan negara. Ini termasuk forum yang disebut "Keadaan Industri Strategis". Perusahaan independen dengan kepentingan protektif (BUMNIS).¹¹



Gambar 2 Penyajian Data Eksportir Antara Indonesia Dengan Australia

Dengan dilaksanakannya dua kegiatan utama yakni Inovasi dan *kedua Strategic Partnership*, Inovasi pengembangan produk baru atau pengembangan produk yang ada untuk memiliki fitur-fitur yang tidak kalah dengan produk baru, yang kedua *Strategic Partnership* dengan menjalin Kerjasama dengan pihak asing untuk mengambil teknologi yang mereka miliki untuk kita terapkan di Inhan dalam negeri, semata-mata pengemabangan produk tidak dari 0 karena, membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang lama, maka dari itu Startegic Partentrship dengan luar ngeri kita ambil teknologi maka anggaran yang digunakan dan waktu yang dipakai akan berkurang secara signifikan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad



Gambar 3 Kendaraan Tempur Anti Ranjau Sanca

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh Bapak Fakhri yang menyatakan bahwa Pindad telah menjalin Kerjasama dengan perusahaan Australia dalam bidang system senjata dan kendaraan tempur, kendaraan tempur sanca itu basic-nya dari bushmaster yang diproduksi oleh Thales Australia untuk melaksanakan Joint Production dari kendaraan tempur sanca tersebut yang cukup berpengaruh terhadap Inhan, kemudian pada system senjata Australia juga memiliki produk unggul yang dalam bidang system senjata EOS yang berfungsi remote control station, yang merupakan senjata yang bisa dikontrol oleh remote, RCWS ini biasanya di install di atas kendaraan tempur, dan kemudia operatornya berlindung di dalam, hal ini dapat meminimalisir anggota yang gugur dalam peperangan, ini merupakan suatu inovasi yang cukup besar.dengan Australia.¹²

Terdapat pola yang selama ini semua berjalan sebagaimana mestinya, perencanaan dibuat oleh Kemhan, kemudian produk yang digunakan akan dipakai oleh TNI, dan yang mana akan disetujui oleh DPR dan Bappenas untuk anggarannya, anggaran-anggran ini diharapkan untuk diserap inhan dalam negeri, supaya inhan dalam negeri ini dapat berkembang dengan terus dapat menghasilkan produk-produk baru untuk mendukung keamanan dan pertahanan Indonesia, dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak yang terlibat.¹³ PT. Pindad sering melakukan koordinasi dengan Kemhan,dan juga TNI secara aktif untuk membahas tentang proses Alpanhankam dan kemudian proses pengadaan alpnhakhham itu sendiri, di Pindad terdapat satu divisi khusus yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan TNI sebagai user dan Kemhan sebagai pemilik anggran, maka sering dilaksanakan koordinasi secara aktif.

Terkait dengan startegi yang dibuat oleh PT. Pindad dalam mewujudkan kemandirian industry pertahanan yakni dalam pengelolaan alutsista Indonesia dilakukan dengan cara mengedepankan optimalisasi langkah pertahanan nasional, pada kasus ini apabila industry pertahanan nasional telah memiliki kapabilitas, untuk memenuhi salah satu usernya dalam hal ini TNI, maka KEMHAN selaku pemilik anggaran, dan TNI sebagai pengguna, harus menggunakan produk-produk nasional. Namin, apabila belum bisa menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pengguna dan pemilik anggaran bisa memiliki alpanhakhham keluar negeri. Dapat disimpulkan bahwa produk dalam negeri tetap menjadi prioritas utana, dan apabila inhan belum bisa memberikan sumbangsihnya, maka pengguna dan pemilik anggaran harus berusaha mengoptimalisasi dengan menyelenggarakan Transfer of Technology dari inhan-inhan yang ada diluar negeri.¹⁴

Adapun mengenai alur pola koordinasi yang berhubungan dengan konsep utama yakni *Military Industrial Complex*, Ketika terdapat *by order* dari Kemhan dan juga TNI sebagai user Secara umum dengan 2 jalur pertama penunjukan langsung dan kedua tender, untuk penunjukan langsung ini ditujukan bagi produk yang sudah eksisting dan sudah aktif digunakan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

oleh TNI sebagai pengguna, contohnya untuk penyediaan amunisi kaliber kecil, senapan serbuk, otomatis akan dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Pindad persero. Adapun tender ini diperuntukan untuk produk-produk yang inhan nasional belum bisa memenuhi yang terdiri agen local dari inhan luar negeri dan dalam tender ini mana akan dicari mana yang paling baik kualitasnya dan mana yang dapat memebrikan ransfer of technology dalam negeri.¹⁵

Dalam operasionalnya Thales Group Australia sebagai salah satu perusahaan yang dapat memproduksi kendaraan khusus 4x4 dengan fitur MRAP (Mine Resistance Ambush Protected). Kendaraan dengan fitur ini dapat menahan ledakan ranjau dan bahan peledak IED hingga bobot 10 kg tanpa membahayakan awak didalamnya. Tidak banyak negara di dunia yang dapat memproduksi kendaraan khusus dengan fitur tersebut. Dengan kerjasama yang dijalin antara Pindad dan Thales Australia yang kemudian membuahkan kontrak pengadaan, Indonesia melalui Pindad dapat memperoleh teknologi untuk memproduksi kendaraan khusus dengan fitur MRAP tersebut. Menjadi salah satu *benefit* yang didapat dari dijalinnya kerja sama tersebut, dengan adanya *Transfer of Knowledge*. Adapun pada rencana startegis yang dibuat oleh TNI untuk 5 tahun kedepan, perancangan untuk memenuhi target MEF secara berkala dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus dengan fitur MRAP khususnya hasil langkah Pindad dan Thales Australia merupakan salah satu langkah upaya pemenuhan MEF TNI. Menjadi poin tambah pemenuhan MEF tersebut.

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024					POSTUR IDEAL			
			JUMLAH		RENC		CAPAI		JUMLAH		RENC			CAPAI		JML	% (8/16)
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI	s.d. MEF-III				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	TNI AD			64,89%					74,62%							49,33%	
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564				783.462	82,85%	
	b. Menam / Raket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354				2.162	63,41%	
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	369	2.000	53,50%			3.738				4.858	41,17%	
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224				1.224	9,89%	
2	TNI AL			55,55%					68,72%							45,47%	
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			162				262	61,45%	
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8				12	33,33%	
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100				160	53,13%	
	d. Ranpur Marinir	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978				1.481	33,96%	
3	TNI AU			43,97%					44,40%							32,64%	
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344				469	56,93%	
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32				32	62,50%	
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72				96	0,00%	
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64				216	11,11%	
	Presentase			41,92%				54,80%								62,58%	
																42,48%	

Sumber: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gambar 4 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam proses ini, pemerintah mulai mengumumkan MEF pada tahun 2007 dan menerapkan kebijakan MEF pada tahun 2009. Kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga fase: fase pertama, 2010-2014; fase kedua, tahun 2010-2014. tahap kedua. 2015-2019 dan fase ketiga 2020-2024. Kebijakan MEF selalu didasarkan pada anggaran pertahanan, dan anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Pembangunan MEF terdiri dari empat elemen, yaitu realisasi ulang, akuisisi, kelahiran kembali, dan pemukiman kembali. Keempat elemen ini berpusat pada satu titik yang disebut *flash point* yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan telah diidentifikasi sebagai kawasan yang paling mungkin terancam. Flash point telah menjadi dasar utama untuk pengembangan komposisi dan desain MEF secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, berdasar *white paper* kebijakan mengenai pencapaian MEF beserta alutsista dan juga alpanhakhham, bukan tentang perlombaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

senjata, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan pertahanan minimum Indonesia. Keempat hal tersebut sebenarnya bergantung pada konsistensi, komitmen dan kesinambungan yang tertuang dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga kesatuan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU).¹⁶

Dengan meninjau pemenuhan persyaratan kerangka keamanan Alutsista TNI tidak sepenuhnya memenuhi tujuan MEF. Di bidang darat, 74,2% target yang sejalan dengan Renstra II MEF telah terpenuhi, dan tingkat kepatuhan senjata ringan dan meriam / misil / misil pada dasarnya telah mencapai target, yang secara signifikan lebih tinggi dari itu. renstra-I.¹⁷ Namun, tentunya beberapa strategi tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala atau masalah. Masalah lainnya, PT Pindad masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan perseroan mengandalkan pembiayaan dari bank. Hal ini disebabkan karena hasil kegiatan perusahaan tidak dapat menghimpun dana untuk pengembangannya. Untuk material, komponen, dan peralatan pabrikan yang masih mengandalkan impor, biaya operasional masih menjadi kendala. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa SDM PT Pindad masih terbatas terutama dalam hal kemampuan teknis dan akademik. Produksi alutsista TNI AD belum optimal yang ditandai dengan banyaknya permasalahan, seperti pembiayaan untuk produksi alutsista. TNI AD masih sangat bergantung pada pinjaman bank. Selain itu, kinerja operasi dan produksi terkait pertahanan PT Pindad gagal membaik. Di sisi lain, sebagian besar produksi PT Pindad dan fasilitas lainnya relatif sudah tua sehingga ada kecenderungan untuk menurunkan kapasitas produksi.¹⁸

SIMPULAN

Sebagai strategi optimalisasi peningkatan industri pertahanan nasional, tentunya sinergitas antar aktor di Indonesia yang berperan di dalamnya, dengan ditinjau dari konsep Military Industrial Complex (MIC), artikel ini menyimpulkan bahwasanya relasi dan keterlibatan baik aktor negara (*public sectors*) maupun non-negara (*private sectors*) dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan sejatinya merupakan *public goods*. Dengan memahami peran masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut legislator, *governance agency*, *private company* dan juga ditambah *end-user* dalam konteks Military Industrial Complex (MIC) artikel ini memahami bahwa industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Hasil dari temuan tersebut berdasar pada tujuan industri pertahanan yang dicanangkan oleh Presiden SBY pada kabinet Bersatu I menjadi awal pembuka, kemandirian industri pertahanan nasional yang nantinya menuju ke tahap MEF ke 3 di tahun 2023 yang mungkin bisa tercapai jika sinergi antara militer, pemerintah, dan *Private company* yang menjadi ujung tombak, penyediaan produksi Alutsista ataupun Alpanhakhham nasional telah bereskalasi dengan cukup spesifik, salah satunya kerja sama yang dijalin dengan Australia yang didasari dalam rencana aksi pada *Lombok Treaty* dan menjadi sebuah agenda dialog pertemuan yang disebut IADSD sejak 2006. Perkembangan yang cukup signifikan terlihat dengan adanya peremajaan produk dan juga inovasi dari *Transfer of Knowledge* yang mana merupakan buah hasil dari dialog pertemuan tersebut dengan kata lain keberhasilan dari *Strategic Partnership*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

yang terjalin, telah menambah jumlah produksi industri pertahanan nasional. dengan menguntungkan sektor politik, militer juga ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework For Security Cooperation*, (2006) (testimony of Australian Parliament House). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf
- Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 71–94. <https://doi.org/10.33172/JPBH.V4I2.332>
- Augusta, I. S. (2014). *Kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam kerangka perjanjian Lombok* [Unikom]. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-intansarah-33233>
- Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Breitenbauch, H., & Jakobsson, A. K. (2018). Defence planning as strategic fact: introduction. <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1497443>, 18(3), 253–261. <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1497443>
- Dubbury, J. (1971). The Military Industrial Complex. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-7(3), 429–433. <https://doi.org/10.1109/TAES.1971.310282>
- Dunlap, C. J. (2011). The Military-Industrial Complex. *Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, 140(3), 135–147.
- Fitri, A., & Sanur, D. (2019). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (Mef). *Jurnal Kajian terhadap isu aktual dan strategis*, Dewan Perwakilan rakyat RI. XI(22), 5–12.
- Koseoglu, A. M. (2012). The Strategic Management of Defence Industry: A Science and Technology Based Configuration. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2128477>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.
- Milia, J., Kasim, Y. K., & Poespithadi, W. (2018). Analysis Of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia And Singapore In 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan : Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 4(2), 104–119. <https://doi.org/10.33172/JP.V4I2.283>
- Montratama, I. (2014). Strategi optimalisasi pengadaan sarana pertahanan bagi industri pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 4(3), 79–98.

-
- Sakti, T. R. (2016). Kerjasama Keamanan : Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional*, IX(1), 99–114.
- Saroinsong, W. (2008). Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3), 566–590. <https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL5.3.482>
- Thompson, G. (2006, November 14). *Australia, Indonesia sign security pact*. ABC. <https://www.abc.net.au/am/content/2006/s1787869.htm>
- Toohey, P. (2014, February 7). *Inside the Sovereign Borders Turn-back Lifeboat*. News.Com.Au.